

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Distribusi Daerah Terhadap Belanja Daerah Di Kabupaten/Kota Sumatera Utara

Putri Cindi Claudia^{*}, Alistraja Dison Silalahi

Fakultas Ekonomi, Prodi Akuntansi, Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah, Medan

Jalan Garu II No. 93, Kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia

Email: putricindicladia30@gmail.com

Email Penulis Korespondensi: putricindic30@gmail.com

Abstrak-Tujuan dari penelitian ini 1) Untuk mengetahui pengaruh penerimaan Pendapatan Asli Daerah terhadap peningkatan Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota Sumatera Utara. 2) Untuk mengetahui pengaruh penerimaan Retribusi daerah terhadap Peningkatan Balanja Daerah Propinsi Sumatra Utara. Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan penulis dalam menganalisis masalah yang ada dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kuantitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang berupa angka-angka yang terdapat dalam laporan Realisasi APBD pada kabupaten/kota di Sumatra Utara Tahun Anggaran 2018 sampai 2020 serta data-data yang berhubungan dengan penelitian. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh positif terhadap belanja daerah sedangkan Retribusi Daerah Berpengaruh Positif Terhadap belanja daerah.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah; Retribusi Daerah; Belanja Daerah

Abstract-The purpose of this study 1) To determine the effect of receipt of Local Own Revenue on increasing Regional Expenditure in the Regency/City of North Sumatra. 2) To determine the effect of receiving regional levies on increasing regional balances of North Sumatra Province. In this study the method of data analysis used by the author in analyzing the problems that exist in this study is to use quantitative methods. The type of data used in this study is secondary data, namely data in the form of figures contained in the APBD Realization report for districts/cities in North Sumatra for the 2018 to 2020 Fiscal Year and data related to research. From the results of this study it is known that Regional Own Revenue does not have a positive effect on regional spending while Regional Retribution has a positive effect on regional spending.

Keywords: Regional Original Income; Regional Retribution; Regional Expenditure

1. PENDAHULUAN

Penetapan Otonomi Daerah bisa menghipnotis pertumbuhan ekonomi suatu daerah karena memungkinkan Pemerintah Daerah buat leluasa merencanakan keuangan daerahnya sendiri dan merumuskan kebijakan yang dapat menghipnotis kemajuan wilayahnya. Pertumbuhan ekonomi menciptakan lapangan kerja baru dengan mengelola asal daya yang terdapat serta menghasilkan contoh kemitraan menggunakan warga, sebagai akibatnya mendorong pemerintahan daerah buat melakukan pembangunan ekonomi yg akan berdampak pada perkembangan aktivitas ekonomi di wilayahnya.

Belanja daerah merupakan bagian dari APBD yang dialokasikan untuk penyelenggaraan pemerintah daerah. Belanja daerah menurut Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten atau kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Dari Laporan APBD, dapat dianalisis sumber dan penggunaan dana oleh pemerintah daerah selama satu tahun fiskal untuk belanja dan pembiayaan. Sumber dana tersebut tercantum dalam APBD yang mencakup Pendapatan Asli Daerah dan Retribusi Daerah (Wahab, 2016)

Pemda memiliki sumber pendapatan daerah berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Retribusi Daerah, maupun lain-lain penerimaan daerah yang sah. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan, sedangkan pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya (Syafriidin, 2015).

Salah satu sumber pendapatan wilayah adalah Pendapatan asli daerah (PAD). Pendapatan asli wilayah (PAD) berasal dari retribusi wilayah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan orisinal daerah yang legal pada menggali pendanaan dalam pelaksanaan swatantra daerah (Rudi and Sujipto, 2017). di prinsipnya semakin besar sumbangan PAD terhadap aturan Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) akan memberikan semakin kecil ketergantungan wilayah kepada sentra (Wahab, 2016).

2. METODE PENELITIAN

2.1 Kerangka Penelitian

Kerangka pemikiran adalah suatu hubungan/kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. kerangka konsep ini gunanya untuk menghubungkan atau menjelaskan tentang suatu topik yang akan dibahas. Jenis penelitian ini menggunakan data kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah 11 kabupaten Kabupaten dan Kota yang terdapat di Provinsi Sumatera Utara yang meliputi 10 daerah Kabupaten 1 daerah Kota sehingga daerah total populasi adalah 11 data sampel sebanyak 11 daerah, yaitu : 1) Kabuapten Nias Selatan, 2) Kabuapten Mandailing Natal, 3) Kabuapten Asahan, 4) Kabuapten Deli Serdang, 5) Kabuapten Langkat, 6) Kabuapten Humbang Hasundutan, 7) Kabuapten Pakpak Bharat, 8) Kabuapten Samosir, 9) Kabuapten Serdang Bedagai, 10) Kota Padangsidimpuan, 11) Kabuapten Dairi pada provinsi sumatera utara tahun 2018-2020 yang terdapat di Badan Pusat Statistik dengan metode penentuan sampel yang digunakan adalah metode Porpositive sampling.

2.2 Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara studi dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan data, mengolah data-data dan informasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

2.3 Sumber data

Data penelitian ini diperoleh dari data pusat statistik yaitu (www.bps.go.id.) dan Perpustakaan Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang.

2.4 Variabel penelitian

Sesuai dengan judul penelitian, yaitu “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja daerah di kabupaten/kota Sumatera utara”

a. Variabel independent (variabel X)

Variabel independent adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain atau menghasilkan akibat pada variabel yang lain, yang pada umumnya berada dalam urutan tata waktu yang terjadi lebih dulu. (Martono, 2015). Variabel independent dari penelitian ini adalah peranan anggaran biaya produksi.

b. Variabel dependent (variabel Y)

Variabel dependent adalah variabel yang diakibatkan atau yang dipengaruhi oleh variabel bebas. (Martono, 2015). Variabel dependent dari penelitian ini adalah Pengendalian Dalam Menunjang Efektifitas.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut merupakan rincian Pendapatan Asli daerah Retribusi daerah terhadap belanja daerah di tahun 2018-2020

Tabel 1. Pengujian data belanja daerah

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	Beta	t	Sig.
1(Constant)	16.320	.486		33.609	.000
Pendapatan Asli Daerah	.008	.035	.026	.238	.813
Distribusi Daerah	122	.029	.388	4.132	.000

Dependent Variable: Belanja Daerah

Berdasarkan tabel diatas dijelaskan

- 1) Pendapatan Asli Daerah Tidak berpengaruh terhadap belanja Daerah. Hipotesis pertama mengenai variabel Pendapatan Asli Daerah diketahui bahwa thitung $0,238 < T_{tabel} 2.051$ dan nilai signifikansi variabel Pendapatan Asli Daerah adalah 0.813 dimana nilai ini lebih besar dari 0.05 ($0.813 > 0.05$), hal ini berarti Pendapatan Asli Daerah Tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah.
- 2) Distribusi Daerah berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Hipotesis pertama mengenai variabel diketahui bahwa thitung $4.132 > t_{tabel} 2.051$ dan nilai signifikansi variabel Retribusi Daerah adalah 0.000 dimana nilai ini lebih kecil dari 0.05 ($0.000 < 0.05$), hal ini berarti Distribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah.

3.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah

Pendapatan asli daerah (PAD) adalah penerimaan daerah dari berbagai usaha pemerintah daerah untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatan rutin maupun pembangunannya, yang terdiri dari

retribusi daerah, bagian laba usaha milik daerah, dan lain-lain penerimaan asli daerah yang sah. Semakin besar kemampuan daerah dalam mengumpulkan pendapatan asli daerah akan semakin longgar alokasi belanja daerah, sehingga terdapat hubungan Negatif antara pendapatan asli daerah dengan belanja daerah.

3.2 Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Belanja Daerah

Pelaksanaan otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan fasilitas dan pelayanan publik serta memajukan perekonomian daerah. Salah satu cara untuk meningkatkan fasilitas dan pelayanan publik dengan melakukan belanja untuk kepentingan investasi yang direalisasikan melalui Belanja Daerah Salah satu faktor yang mempengaruhi belanja daerah dari segi keuangan (financial factors) yaitu melalui pendapatan (revenue). Pemerintah daerah sebagai organisasi sektor publik mempunyai sumber-sumber pendapatan daerah baik yang berasal dari pemerintah pusat maupun yang berasal dari daerah itu sendiri. Kemampuan daerah untuk menyediakan sumber-sumber pendapatan yang berasal dari daerah itu sendiri yaitu melalui penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Kemandirian daerah dapat diwujudkan salah satunya dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor retribusi daerah. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang diberikan atau disediakan oleh pemerintah daerah untuk orang pribadi atau badan, dimana pihak yang membayar retribusi daerah mendapatkan jasa atau imbalan secara langsung dan pelaksanaannya didasarkan atas peraturan yang berlaku. Jika Retribusi Daerah meningkat, maka Pendapatan Asli Daerah juga akan meningkat sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan pendapatan Belanja Daerah guna meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana kepada masyarakat (Mamonto, Sandry Yossi, 2014) Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah mampu berotonomi adalah terletak pada kemampuan keuangan daerahnya. Hal ini berarti pemerintah daerah sebagai daerah otonom harus mengoptimalkan sumber keuangannya sendiri. Upaya ini perlu dilakukan guna mengurangi ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Dari penjelasan tersebut maka dapat dikatakan jika penerimaan retribusi daerah meningkat maka berpengaruh positif terhadap belanja pemerintah daerah.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan data, penulis memperoleh kesimpulan dari penelitian mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah Retribusi Daerah terhadap Belanja Daerah pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Sumatera Utara Tahun 2018 sampai dengan 2020 sebagai berikut : Pendapatan Asli Daerah secara parsial Tidak berpengaruh positif sedangkan Retribusi Daerah Berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Sedangkan secara simultan Retribusi Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah pada Pemerintahan Kabupaten/Kota Sumatera Utara.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penelitian ini dapat dilaksanakan dengan baik berkat bantuan, kerjasama dari berbagai pihak, khususnya para dosen dilingkungan fakultas ekonomi prodi akuntansi Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan, yang telah memberikan masukan atas penyempurnaan dari tulisan ini, untuk itu peneliti mengucapkan banyak terimakasih.

REFERENCES

- Hananto, Fian, Dwi. 2018. *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Belanja Modal Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Lampung (2012-2016)*. Yogyakarta: UII.
- Mamonto, Sandry Yossi, J.B. Kalangi dan Krest D. Tolosang. 2014. "Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Modal." *Urnal Universitas Sam Ratulangi*.
- Muhtarom, Abid. 2015. *Analisis PAD Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Lamongan Periode 2010-2015*. Akuntansi. Jurnal Ekbis. Nordiawan, Deddi. 2011.: Selemba Empat.
- Rudi, Prasetyo, and Ngumar Sujipto. 2017. "Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah." *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* 6 No 3 (20).
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Albeta.
- Syafridin, Ahmad. 2015. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Dikabupaten Kudus Tahun 2004-2013." *Journal of Accounting, 1*.
- Wahab, Abdul. 2016. "Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah Dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Terhadap Belanja Daerah Di Kabupaten Dan Kota Provinsi Jambi." *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Unja*.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. www.bps.go.id.